

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adjie, Habib., 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Zainuddin., 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, Asikin, Z., 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Black, Henry Campbell., 1910, *Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn.
- Butarbutar, Elizabeth N., 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUH Perdata & Perkembangannya*, Refika Aditama, Medan.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni., 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Fuady, Munir. 2017., *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya., 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazairin, 1983, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tintamas Jakarta.
- Keraf, Sonny., 1996, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Khisni, Akhmad., 2013, *Hukum Waris Islam*, UNNISULA PRESS, Semarang.
- Kie, T. T., 2011, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Maman, Suparman., 2018, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., 2014, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Miru, Ahmad., 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Moechtar, Oemar., 2019, *Pekembangan Hukum Waris Praktek Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia, Surabaya.
- Pitlo, A., Arief, I., 1979, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono., 1962, *Hukum Warisan di Indonesia*, IS Gravenage Vorkink van Hove, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono., 1976, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung.
- Pudjosubroto, R. Santoso., 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta.
- Ramulyo, Moh. Idris., 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, I. K.O., 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidik, H. Salim., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 2006, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, S., Mamudji, S., 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo., 1966, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta.
- Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudjana, N., Ibrahim., 1989, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Sinar Baru, Bandung.
- Suparman, Eman., 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutantion, R., Oeripkartawinarta, I., 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Wibawanti, E. S., R. Murjiyanto., 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 1998/1999.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Pemerintah Indonesia. 1966. Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1966, No. 38. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1961. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1961, No. 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996, No. 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1998, No. 52. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 120. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2006. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia. Jakarta.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 395. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.